

PANDEMI COVID 19 DAN MENGUATNYA PROTEKSIONISME

Ade Priangani (Univ. Pasundan), Makbul Mansyur(Univ. Pasundan) ,
Eden K. Soeari (Univ. Pasundan)

Abstrak

Merebaknya Covid-19 secara global menyebabkan negara-negara di dunia kesulitan mengantisipasi dan menghindari wabah yang ditimbulkan oleh wabah yang berasal dari Wuhan Cina. Karena penyebarannya yang begitu cepat dan massif, maka negara-negara di dunia, bahkan lembaga kesehatan dunia sekalipun kedodoran, dan akibatnya negara-negara mencari jalan aman sendiri-sendiri, serta berupaya untuk memagari segala hal yang dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan negara dari peluang untuk keluar dari wilayah teritorinya, termasuk sektor ekonomi primer. Semangat ini cenderung bergulir mengarah pada proteksionisme, ditengah melemahnya multilateralisme yang bertujuan mengatasi masalah global. Kajian ini akan mencoba mencari tahu seberapa besar dampak yang ditimbulkan Covid-19 terhadap munculnya proteksionisme negara-negara di dunia.

Kata Kunci : *Pandemi, Covid-19, Proteksionisme.*

A. Pendahuluan

Sejak akhir tahun 2019, virus corona telah menyerang Wuhan, China. Virus itu terus menyebar dengan cepat ke berbagai negara, dan tatanan dunia telah berubah karena pandemi global Covid-19. Kondisi pandemi COVID-19 menjadi alarm bagi individu dan lingkungan sekitar untuk memperkuat protokol kesehatan, dan mencari cara untuk mengatasinya. Bagi ekonomi politik internasional, pandemi Covid-19 ini dijadikan sebagai babak baru dalam pergerakan politik global, karena semua negara terkena dampak pandemi ini.

Kalangan Barat menduga bahwa Covid 19 adalah buatan China untuk memberikan tekanan kepada hegemoni AS. China membuat strategi untuk menutup mulut AS, yang terus memandang bahwa pencapaian ekonomi yang dinikmati China didasari praktek perdagangan dan industri yang curang. AS dibawah Presiden Donald Trump kemudian menerapkan tarif tinggi pada berbagai produk China, yang kemudian dibalas China. Dunia pada waktu itu juga dibayangi naiknya harga minyak akibat ketegangan antara AS dan Iran di Teluk Parsi, yang berpotensi mengganggu distribusi atau pasokan minyak dalam proporsi signifikan. Tidak kalah penting adalah intensifikasi Revolusi Industri 4.0 yang mendisrupsi perusahaan-perusahaan besar, dan yang menimbulkan ketidakpastian yang tinggi.

Namun virus yang dikembangkan oleh China kemudian menjadi tidak terkontrol, karena menunjukkan penyebaran yang sangat cepat di China maupun di negara lain, sehingga WHO

telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Masyarakat (*Public Health Emergency of International Concern*). Virus ini menyerang saluran pernafasan dengan gejala awal flu hingga dapat menyebabkan sindrom pernapasan dari batuk maupun bersin (Ren L et al, 2020). COVID-19 dapat memberikan efek mulai dari flu yang ringan sampai sangat serius, setara atau bahkan lebih parah dari MERS-CoV dan SARS-CoV (Kirigia & Muthuri, 2020). COVID-19 disebut juga sebagai zoonotic yaitu penularannya ditularkan melalui manusia dan/atau hewan. Pandemi COVID-19 telah membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi, dan yang menguatkan dugaan diatas adalah, selama pandemi, kegiatan ekspor terbesar di dunia dipegang oleh China (Yang & Ren, 2020).

Konsekuensinya, nyaris segala prediksi pertumbuhan ekonomi hadapi perlambatan. Dengan timbulnya Covid- 19, seluruh dinamika politik internasional sangat berfokus pada upaya penindakan virus mematikan itu. Sehingga pandemi Covid- 19 dapat dijadikan sebagai babak baru dalam pergerakan politik global. COVID-19 menjadi salah satu permasalahan kesehatan serius yang dapat menyebabkan ketakutan sehingga mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, maupun sosial bagi masyarakat di dunia. Ketakutan-ketakutan yang timbul akibat adanya virus tersebut dapat menyebabkan tindakan-tindakan yang irrasional. Roosevelt tahun 1932 pernah mengatakan satu-satunya hal yang harus ditakutkan adalah rasa takut itu sendiri. Rasa takut yang berlebihan dapat membuat seseorang bereaksi secara berlebihan pula.

B. Landasan Teoritis

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. (Merry Dame Cristy Pane, 2021)

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan,

misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.

Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle-East Respiratory Syndrome (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. (Merry Dame Cristy Pane, 2021)

Virus Corona yang awalnya terjadi di Wuhan, China, telah menyebar luas dan menginfeksi hampir seluruh negara di dunia, sehingga sudah kategori pandemi. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. (Ratna Dhelva I. W, 2021)

Dampak yang ditimbulkan bukan hanya di sektor kesehatan, melainkan juga menimpa perekonomian nasional dan global. Dalam sektor kesehatan, dapat mengancam negara melalui naiknya angka kematian dalam suatu negara akibat terjangkit oleh virus. Sedangkan, dalam sektor ekonomi, tentu saja membuat perekonomian internasional/dunia kian melemah, padahal ekonomi politik internasional sendiri sangat diperlukan untuk stabilitas global, karena dalam pandangan John S. Mill adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana memakmurkan sebuah negara (Gilpin, 2001: 25)., sedangkan Robert Gilpin, memahaminya sebagai hubungan paralel dan saling interaksi antara 'negara' dan 'pasar' di dunia modern menimbulkan 'ekonomi politik' (Leiteritz, 2005: 52).

Kehadiran virus covid-19 membuat jarak antar negara, berkurangnya aktivitas ekspor dan impor, kerjasama terganggu, juga terjadinya penurunan yang sangat drastis di sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata. Akhirnya banyak negara yang kemudian mengalami hambatan tarif dan kondisi finansial domestik yang semakin menurun, sehingga pada akhirnya negara-negara berjuang sendiri, dan cenderung melindungi ekonominya dengan melakukan proteksionisme. Proteksionisme adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi yang mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain melalui cara-cara pembatasan arus ekspor dan impor barang dan jasa seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi ekonomi dalam negeri. (Anggi Dwifiani, 2018)

Secara konsepsional, proteksionisme atau Proteksi Perdagangan adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi yang

mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain melalui cara-cara pembatasan arus ekspor dan impor barang dan jasa seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi ekonomi dalam negeri.

Proteksi perdagangan diambil dengan berbagai bentuk seperti tarif impor, subsidi, kuota, pelabelan, persyaratan keamanan dan kesehatan produk. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik, misalnya melindungi produsen lokal dari persaingan impor. Kebijakan ini bertentangan dengan perdagangan bebas yang meminimalkan pembatasan perdagangan oleh pemerintah. Di era modern, proteksionisme semakin erat kaitannya dengan anti-globalisasi dan anti-imigrasi. Istilah ini sering digunakan dalam konteks ekonomi; proteksionisme dalam ekonomi mengacu pada kebijakan atau doktrin yang melindungi perusahaan dan pekerja di suatu negara dengan membatasi atau mengatur perdagangan luar negeri.

Proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang diwarnai dari sistem merkantilisme yang berkembang sejak abad pertengahan. Bagi kaum merkantilis, ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks politik. Mereka bahkan beranggapan bahwa ekonomi merupakan sarana untuk meningkatkan kekuatan negara. Tokoh yang dapat dikatakan paling berpengaruh dalam mencanangkan ide proteksionisme adalah Alexander Hamilton (1755-1804), seorang ekonom dan anggota kongres di AS.

Alexander Hamilton, Dalam laporannya yang berjudul *Report on Manufactures* (1791), mengatakan negara harus berperan aktif dalam mengembangkan sistem produksi, tidak saja dalam hal akumulasi kapital, tetapi juga dalam mengatasi pelbagai hal didalam sistem perdagangan internasional yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Kepada kongres AS, Hamilton memberikan rekomendasinya yang meliputi beberapa hal, antara lain: *Pertama*, Negara harus menerapkan *Protecting Duties* (tarif impor) bagi produk-produk asing yang dikhawatirkan dapat “membunuh” industri dalam negeri, khususnya barang-barang manufaktur yang diproduksi oleh negara-negara pesaing AS; *Kedua*, Negara harus berani melakukan *Prohibitions of Rival Articles* (pelarangan impor bagi produk negara-negara pesaing). Hal ini perlu dilakukan untuk menghidupkan industri didalam negeri; *Ketiga*, Negara harus mampu melakukan *Prohibition of the Exportation of materials of manufactures* (pelarangan ekspor produk manufaktur), terutama di sektor-sektor dimana AS dapat memproduksinya secara lebih murah dari negara lain. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menghemat dan sekaligus membatasi entry (jalan masuk) bagi negara-negara lain didalam segmen produk tertentu; dan *Keempat*, Negara hendaknya menerapkan *Judicious Regulation for the Inspection of Manufactured Commodities* (peraturan hukum yang mengatur pengecekan

komoditas manufaktur). Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kualitas produk kepada konsumen dan menghindari kemungkinan penyelundupan. Dengan peraturan ini, maka mereka yang sengaja menghindari tarif impor dapat diberi sanksi hukum.

Tokoh proteksionis lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah ekonom Jerman, Fredrich List (1789-1846). Berbeda dengan Hamilton, List lebih memusatkan diri pada tataran teoritis. Menurut dia, disiplin politik ekonomi harus dimulai dengan pengakuan terhadap hakekat hubungan internasional yang sarat dengan konflik kepentingan, terutama negara industri maju-negara miskin yang berkonsentrasi pada produk pertanian dan bahan mentah.

Pemikiran List pada dasarnya menyatakan bahwa kepentingan negara-negara industri maju sangat sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang mengharuskan negara lain untuk berdagang dengan mereka. Namun bagi negara-negara yang belum maju industrinya, proteksionisme merupakan kebijakan yang sangat diperlukan untuk mamacu industri di dalam negeri dalam berkompetisi dengan pihak asing.

Dengan kondisi lain, akibat pandemi Covid-19 saat ini dunia mengarah kepada proteksionisme, namun bukan kepada arah politik, hal ini hanya semata-mata karena pertimbangan pure economy akibat pandemi.

C. Pembahasan

Covid 19 melahirkan paling sedikit dua pandangan tentang penanganannya, *pertama*, yang khawatir berlebih dan pesimis terkait pendekatan yang telah diambil oleh negara-negara di dunia dalam menghadapi persoalan ini. Dan yang *kedua*, menyatakan bahwa pandemi covid-19 ini hanya menjadi krisis sesaat dan kondisi akan normal kembali jika melaksanakan protokol kesehatan.

Perbedaan pandangan tersebut, memaksa negara untuk meneguhkan nasionalismenya. Negara lebih focus ke persoalan dalam negeri dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan negara sendiri ketimbang mencoba mengatasi permasalahan regional atau pun global. Inilah yang kemudian melahirkan tindakan ekonomi-politik proteksionisme, contoh hubungan antara AS dengan Jerman dan Perancis memanas gara-gara APD. Hal ini terjadi ketika pemerintah Jerman menuduh Amerika Serikat telah mencegat kiriman peralatan medis dari Thailand di bawah bendera perusahaan pemasok medis 3M, dan mengalihkan pengiriman tersebut ke Amerika Serikat. Jerman menyebutnya sebagai bentuk 'pembajakan modern', (Der Tagesspiegel (03/04)). Sedang Perancis, kesal kepada AS, karena AS telah mengalihkan pengiriman masker medis dari Shanghai yang ke Perancis, namun karena AS menawarkan harga tiga kali lipat dan mereka

sanggup untuk membayar di muka, sehingga barang tersebut dialihkan ke AS. (The Guardian (04/04).

Perjalanan manusia antar negara, pergerakan barang dan transaksi jasa antar negara dibatasi. Hubungan internasional yang bercorak globalis mengalami ujian akibat wabah corona ini. Belum lagi ancaman resesi ekonomi global yang berimbas pada kondisi domestik suatu negara. Respon terhadap pandemic COVID-19 memang masih cenderung negara-sentris, 'mencari selamat sendiri', dan didominasi pendekatan keamanan ketimbang kemanusiaan.

Hal lain yang terlihat jelas adalah pola hubungan antar negara yang berubah. Dilihat dari hubungan antar negara adalah adanya peralihan hubungan antar negara dari yang bercorak globalis ke basis nasionalisme, serta munculnya rivalitas kekuatan besar baru pasca perang dingin.

COVID-19 menjadi salah satu permasalahan kesehatan serius yang dapat menyebabkan ketakutan sehingga mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, maupun sosial bagi masyarakat di dunia. Ketakutan-ketakutan yang timbul akibat adanya virus tersebut dapat menyebabkan tindakan-tindakan yang irrasional, seperti menimbun berbagai barang pokok maupun barang yang dianggap dapat menangkal virus corona, seperti; hand-sanitizer, anti septic, masker, jahe, kunyit, dan lain-lain dengan jumlah yang berlebih yang dapat disebut dengan panic buying. Roosevelt tahun 1932 pernah mengatakan satu-satunya hal yang harus ditakutkan adalah rasa takut itu sendiri. Rasa takut yang berlebihan dapat membuat seseorang bereaksi secara berlebihan pula.

Persoalan Covid-19, tidak lagi menjadi masalah kesehatan semata-mata, melainkan juga menjadi masalah ekonomi dan politik, karena kondisi tersebut menyebabkan permintaan atas barang-barang yang dibutuhkan meningkat sedangkan ketersediaan barang menjadi langka. Dampaknya harga barangpun melonjak bahkan berkali-kali lipat dari harga normal. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan sebagian orang sebagai peluang untuk menjual barang dengan harga yang fantastis meskipun dalam situasi krisis. Dalam konteks politik, banyak kalangan yang memanfaatkan kondisi pandemi untuk kepentingan politik, bagi penguasa pandemi bisa dijadikan moment untuk menekan oposisi, begitu juga bagi oposisi, memanfaatkan moment untuk menekan pemerintahan.

Seluruh bangsa mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, perlambatan perdagangan, sampai ketidakseimbangan global yang berkembang yang mengarah kepada pembekuan sistem moneter. Hal inilah yang membuat banyak pernyataan bahwa negara-negara saat ini perlu berkomitmen serius untuk meninggalkan kebijakan proteksionisme dan memastikan perdagangan antar negara bisa tetap berjalan. Hal tersebut sangat penting untuk

memastikan ketersediaan barang-barang penting, seperti komoditas pangan, obat-obatan serta peralatan medis. Kebijakan proteksionisme mengganggu kelancaran rantai pasok dan menghambat ketersediaan pasokan di pasar yang akan berujung pada kelangkaan.

Imbas dari kebijakan setiap negara dan kebijakan negara itu sendiri menimbulkan kelumpuhan sebagian sistem perekonomian seperti halnya sistem ekspor dan impor yang tertunda, serta penutupan sejumlah lapangan pekerjaan guna mencegah penyebarannya virus tersebut. Penanganan COVID-19 pun tidak lepas dari struktur ekonomi politik yang timpang. Kelas menengah ke atas bisa bekerja dari rumah atau work from home, namun banyak pekerja yang tetap harus mengambil risiko untuk tetap bekerja karena tidak diliburkan atau karena mereka memiliki penghasilan harian.

Pelemahan produksi industri baik di negara maju maupun negara berkembang terjadi pada semua kategori barang, terutama *capital goods* dan *consumer durables*. Pelemahan tajam aktivitas produksi terutama dialami oleh Tiongkok. Pelemahan ekonomi juga terjadi di UE, ketika sejumlah negara menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas lebih awal dibandingkan Jepang dan Inggris. Pada awal masa pandemi COVID-19 di wilayah Eropa, beberapa negara Uni Eropa menerapkan larangan atau batasan ekspor persediaan alat kesehatan ke sesama negara anggota yang membutuhkan. Contoh negara yang menerapkan larangan tersebut adalah Jerman dan Prancis. Keputusan ini diambil oleh satuan darurat pemerintah untuk menghindari kekurangan APD dalam perlombaan melawan virus COVID-19.

Secara umum, kontraksi ekonomi di UE, Jepang, dan Inggris dipicu oleh pelemahan aktivitas konsumsi, kegiatan produksi dan investasi, serta perdagangan internasional. Pelemahan ekonomi juga dialami oleh Amerika Serikat dan India, meski ekonomi kedua negara tersebut masih tumbuh positif. Pelemahan ekonomi AS terutama dipicu oleh penurunan pengeluaran konsumen, kegiatan investasi, dan ekspor.

Negara-negara di dunia tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja tetapi krisis sosial – politik, fenomena saat itu disebut dengan ‘Krisis Multidimensional’ karena berdampak buruk pada sistem negara. Pasca pandemi COVID-19 perekonomian mulai terguncang banyak usaha yang gulung tikar dan pekerja di PHK. Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan pendapatan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dampak virus corona, selain menimbulkan kematian massal, juga menurunnya impor barang modal dan bahan baku yang memukul investasi dan produksi. Perusahaan mulai fokus ke ekonomi domestik, karena ekonomi global dan sektor perdagangan terganggu.

Aktivitas konsumsi global melemah signifikan karena pembatasan aktivitas masyarakat, penurunan daya beli, dan kepercayaan konsumen yang memburuk. Pelemahan konsumsi global

terutama terjadi pada kegiatan konsumsi produk non-esensial seperti pakaian, rekreasi, dan kendaraan. Penjualan kendaraan turun tajam seiring konsumen menahan pengeluaran *durable goods* karena kepercayaan konsumen yang memburuk. Pelemahan konsumsi juga terjadi pada sektor jasa, seperti restoran dan bioskop akibat konsumen menghindari interaksi di ruang publik karena khawatir terinfeksi COVID-19. Sementara itu, konsumsi untuk kebutuhan esensial seperti bahan makanan dan alat kesehatan tetap tumbuh positif, namun belum mampu menahan pelemahan aktivitas konsumsi secara keseluruhan. Berdasarkan negara, pelemahan konsumsi terutama dialami oleh negara berkembang seperti India dan Tiongkok.

Sentimen bisnis memburuk akibat kebijakan pembatasan aktivitas yang menyebabkan terhambatnya pembukaan bisnis baru, gangguan supply chain sehingga meningkatkan vendor lead times, peningkatan pemutusan hubungan kerja karyawan, dan melemahnya kepercayaan bisnis.

Rerata ekspor Jepang melemah signifikan dipicu oleh pelemahan permintaan global terutama produk mobil dan perlambatan *business spending*. Kinerja ekspor AS melemah sejalan menurunnya kinerja ekonomi mitra dagang utama dan tidak terpenuhinya target dari kesepakatan peningkatan perdagangan dengan Tiongkok. Di negara berkembang, penurunan kinerja ekspor terutama di alami oleh Tiongkok dan India. Ekspor Tiongkok dan India melemah signifikan akibat kebijakan *lockdown* yang mengganggu jalur transportasi perdagangan internasional.

Di titik ini sebenarnya telah terjadi keseimbangan baru berupa peluang kerja sama antara negara dan pasar. Negara saat dibutuhkan hadir menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan warganya di satu sisi, namun juga memberikan ruang kepada pasar untuk tetap berkontribusi. Tentu diperlukan serangkaian langkah konkret untuk mengimplementasikannya. Namun, jika melihat dari studi ekonomi politik yang mempelajari interaksi antara politik dan ekonomi, langkah-langkah buruk yang diambil pemerintah, misalnya upaya menarik wisatawan ketika COVID-19 atau lambatnya pemberlakuan pembatasan sosial adalah cerminan dari dinamika pembagian kekuasaan dan sumber daya dalam suatu negara.

Merebaknya wabah Covid-19 ke seluruh dunia menjadi pandemi global memaksa dunia berubah. Tidak hanya dari negara, pasar, tetapi juga masyarakat. Dalam interaksi tersebut, masing-masing aktor memiliki kepentingan tersendiri yang ingin dicapai. Pada akhirnya akan melahirkan siapa yang menjadi pemenang (*winner*) dan siapa yang harus rela jadi pecundang (*looser*). Karena interaksi itu pada dasarnya melibatkan masyarakat maka konsekuensi dari interaksi dua kekuatan tersebut juga berdampak kepada masyarakat, di tingkat nasional (domestik suatu negara) hingga secara lokal.

World Trade Organization (2020) menunjukkan bahwa ada dua jenis kebijakan perdagangan umum yang diambil oleh negara-negara untuk mengatasi krisis: (1) larangan atau pembatasan ekspor, dan (2) penangguhan persyaratan impor sementara. Adanya kebijakan pembatasan ekspor dapat menyebabkan gangguan pada pasokan dan kenaikan harga suatu produk dan diperkirakan akan berdampak pada harga dunia (2). Tingginya harga impor pada produk tertentu membuat negara berkembang sangat rentan terhadap perubahan kebijakan oleh eksportir (Espitia, Rocha, & Ruta, 2020). Penerapan hambatan non tarif yang ketat akan mengganggu kelancaran rantai pasok (supply chain) dan menghambat ketersediaan pasokan suatu produk di pasar yang akan berujung pada kelangkaan. (Zamroni Salim, dkk, 2020)

Negara-negara yang paling terpengaruh oleh pandemi COVID-19 adalah pengeksportir utama produk makanan. Sebelum wabah COVID 19 menyebar di seluruh dunia, laporan terhadap hambatan non-tarif yang dinotifikasi ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terus meningkat dalam 20 tahun terakhir. Menurut WTO (2020) setelah pandemic COVID-19 melanda sebanyak 27 negara anggota WTO melaporkan 85 pemberitahuan dimana mencakup 52 peraturan TBT (regulasi teknis, standar, prosedur control kualitas) dan 33 SPS (Figure 1). Pelaporan tersebut dilakukan pada bulan Februari hingga April 2020. Sebagian besar diserahkan kepada WTO berdasarkan ketentuan yang bersifat mendesak dari SPS dan Perjanjian TBT sebagai tanggapan atas masalah yang ditimbulkan oleh pandemi. Laporan produk yang terkait dengan TBT dan SPS di masa pandemi ini mencakup serangkaian produk kesehatan, termasuk APD, makanan, hewan hidup, peralatan medis, obat-obatan (farmasi), produk tumbuhan, dan medical supplies. (Zamroni Salim, dkk, 2020)

Pada satu sisi, keputusan ini cenderung positif karena merupakan bentuk pengutamakan kebutuhan dalam negeri bagi negara-negara pengeksportir. Dengan demikian, pemerintah dapat mencegah adanya kenaikan harga dan kekurangan persediaan di pasar domestik. Akan tetapi, pembatasan perdagangan ini juga menciptakan dampak negatif karena menandakan adanya upaya untuk mengurangi ketersediaan bahan di pasar global, sehingga menciptakan efek domino, seperti panic buying dan kompetisi harga yang lebih mahal. Terutama bagi konsumen berpenghasilan rendah dari negara-negara pengimpor yang akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Kebijakan pembatasan perdagangan ini tentu akan terus memunculkan ketegangan perdagangan (*trade tension*) bagi sejumlah negara karena banyak negara yang mulai mengalami resesi ekonomi. (Kathleen Mintarja, dkk, 2020)

Krisis ekonomi dan kesehatan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 membuat negara-negara yang awalnya menjunjung prinsip pasar bebas mengeluarkan ratusan ribu triliun subsidi untuk meningkatkan pertahanan mereka dari perusahaan asing. (Valentina Pop, 2020)

Selain itu, negara-negara berkembang termasuk Jepang, Australia, Jerman, Perancis, dan Italia juga memperketat investasi asing akibat rasa takut terhadap pandemi COVID-19. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memperkirakan bahwa investasi asing akan menurun sebesar 30% dibandingkan dengan tahun lalu akibat pandemi ini. Langkah ini diambil oleh negara-negara atas dasar pertimbangan bahwa selama pandemi COVID-19, negara harus menjadikan sektor ekonomi dalam negeri sebagai prioritas utama.

Keputusan beberapa negara untuk melakukan pembatasan atau larangan ekspor untuk bahan-bahan makanan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh negara dengan landasan kepentingan nasional. Bagi negara eksportir, salah satu tujuan utama dalam melakukan pembatasan ekspor adalah memastikan bahwa negara mereka memiliki persediaan pangan yang cukup, terutama selama masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan adanya penurunan produktivitas dalam rantai pasokan makanan.

Uraian diatas menguatkan asumsi bahwa pandemi Covid-19, telah mengubah tatanan yang sebelumnya cenderung multilateralis, liberalis, dan menjunjung tinggi prinsip pasar bebas mengarah pada realis, proteksionisme atau perkuatan nasional, mengacu pada embahnya ilmu Hubungan Internasional, Hans J. Morgenthau dalam bukunya yang berjudul *Politics Among Nations*. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional juga biasanya didefinisikan sebagai strategi dan kapabilitas ekonomi karena politik internasional merupakan suatu *struggle for power* antarnegara.

D. Simpulan

Dari uraian yang sudah disampaikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, merebaknya Covid-19 secara global, telah menyebabkan melemahnya multilateralisme yang bertujuan mengatasi masalah global, kemunculan Covid-19 yang dimulai dari Wuhan yang secara cepat berkembang menjadi masalah global.

Kedua, Terjadi perubahan konstalasi dunia yang sebelumnya cenderung multilateralis, liberalis, dan menjunjung tinggi prinsip pasar bebas mengarah pada realis, proteksionisme atau perkuatan nasional.

Ketiga, Proteksionisme menjadi kebijakan yang paling populer dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi akibat pandemik Covid-19 yang cenderung cepat dan massif dalam penyebarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. J. H. Irawan, “Fenomena Covid-19: Dampak Globalisasi Dan Revitalisasi Multilateralisme,” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, vol. 0, no. 0, pp. 47–52, 2020.
- Anggi Dwifiani, 2018, *Proteksionisme vs Multilateralisme, Berpihak Kemanakah Indonesia?*. Akurat.co, Jakarta.
- D. Aditia, D. Nasution, F. S. Sains, U. Pembangunan, P. Budi, and U. S. Utara, “Aditia, 2020,” *J. Benefita*, vol. 5, no. 2, pp. 212–224, 2020.
- I. Putra and I. Dana, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Farmasi Di Bei,” *E-Jurnal Manaj. Univ. Udayana*, vol. 5, no. 11, p. 249101, 2016.
- Kathleen Mintarja, Richard Theo Parulian, Stella Claresta Alexander. 2020. *Dampak Kebijakan Komoditas Pangan di Masa Pandemi COVID-19 terhadap Dinamika Perekonomian Global*. Jurnal Sentris, Vol. 1 No. 2 (2020): COVID-19 in International Relations Perspective: Impact on Global Dynamics.
- Merry Dame Cristy Pane, 2021. Virus Corona. *ALODOKTER*, 6 Agustus 2021.
- Ratna Dhelva I. W, 2021. *Bedanya Endemi, Epidemi, dan Pandemi*. Surabaya : Fakultas Keperawatan UNAIR.
- Valentina Pop, “Protectionism Spreads Globally With the New Coronavirus,” *WSJ*, 29 Mei 2020, <https://www.wsj.com/articles/protectionism-spreads-globally-with-the-new-coronavirus-11590779442>.
- Zamroni Salim, dkk, 2020. Policy Paper: *KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI GLOBAL DALAM MASA NEW NORMAL COVID-19: Bagaimana Indonesia Mengambil Momentum?*. Jakarta : Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI.
- https://www.researchgate.net/publication/341638805_Pandemi_COVID-19_Dampak_Sosial-Ekonomi_Tantangan_dan_Potensi_Solusi_Sudut_Pandang_Sosiologis.